

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
Kajian Investasi Asing di Jawa Tengah:
Pendekatan Ekonomi Institusional



Dr. ANGELINA IKA RAHUTAMI, M.Si.
NPP/NIDN: 05811998215/0622026802
MG. WESTRIE KEKALIH, S.E., M.Si.
NPP/NIDN: 05811993141/0624046901
SHRESTA PURNAMASARI, S.E., M.Sc.
NPP: 0582019368

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIKA SOEFGIJAPRANATA SEMARANG
JUNI 2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Kajian Investasi Asing di Jawa Tengah
Pendekatan Ekonomi Institusional
2. Ketua Tim
 - a. Nama : Dr. Dra. A. IKA RAHUTAMI, M.Si.
 - b. NPP : 5811998215
 - c. Program Studi : Manajemen
 - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : ika@unika.ac.id
3. Anggota Tim
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 7.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Ekonomi,

Semarang, 14 Juli 2020
Ketua Tim Pengusul

YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.
NPP : 5811999224

Dr. Dra. A. IKA RAHUTAMI, M.Si.
NPP : 5811998215

Menyetujui,
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Manajemen - Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 26 Juni 2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

Kajian Investasi Asing di Jawa Tengah Pendekatan Ekonomi Institusional

Dengan catatan review sebagai berikut:

- (1) Penelitian yang serius dengan (2) pengungkapan lebih menekankan pada kuantifikasi (jumlah dan nilai \$) dengan banyak angka dalam tabel dari sumber resmi yang banyak dimanfaatkan juga oleh media massa tetapi dinarasikan dengan menarik oleh tim peneliti. (3) Visualisasi data mungkin bisa lebih menarik. (4) Pengungkapan data kuantitatif yang digali menggunakan kuesioner dalam wawancara mendalam kurang diberi ruang/keseimbangan. (5) Insentif ekonomi yang mungkin diekspektasi investor dari pemerintah karena dampak berkepanjangan dari COVID-19 dan insentif ekonomi mungkin lebih menarik diungkap daripada tanggapan investor terhadap penanganan oleh pemerintah. (6) Aspek alih teknologi yang dirujuk dari Menteri (dan realisasinya) dan penyerapan tenaga kerja/pembukaan lapangan kerja baru oleh investasi asing, belum mendapat perhatian.
- 1. pembahasan didukung dengan argumentasi yang lebih komprehensif 2. Pembahasan didukung dengan teori supaya argumentasi yang dibangun akan menjadi lebih baik

Reviewer 1

Reviewer 2

Dr WIDURI KURNIASARI, S.E., M.Si.

RICKY DWI BUDI HARSONO, S.E., M.Si.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

RINGKASAN

Data menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan persebaran ijin prinsip di Jawa Tengah secara konsisten dari tahun ke tahun. Literatur menunjukkan bahwa perbedaan minat investasi oleh investor asing dipengaruhi oleh iklim investasi masing-masing wilayah, tidak terbatas pada indikator-indikator yang bersifat makro ekonomi namun juga oleh kelembagaan dan risiko politik.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi guna meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dalam mendorong peningkatan investasi terutama PMA. Hal ini sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mencanangkan slogan “Jawa Tengah Ladang Investasi tahun 2025”. Diharapkan dengan meningkatnya realisasi investasi di Jawa Tengah maka secara jangka panjang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di semua wilayah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk mengetahui persepsi masing-masing pemangku kepentingan terkait dengan iklim investasi di Jawa Tengah dengan menggunakan *in-depth interview*. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang dengan data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner. Dalam perjalanan penelitian, karena pandemic COVID-19 maka penelitian melakukan penyesuaian dalam metode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investasi baik PMA maupun PMDN. Berdasarkan hasil wawancara investor melihat bahwa Jawa Tengah memiliki komitmen politik untuk menjaga iklim investasi. Kebijakan yang cepat dan tepat diperlukan agar iklim investasi dari sisi kelembagaan dan politik tetap terjaga. Keberpihakan pemerintah Jawa Tengah yang mencerminkan cara menghadapi risiko politik juga menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan.

Dari sisi risiko politik, terlihat bahwa risiko politik nasional tidak dapat digeneralisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten kota karena setiap daerah memiliki kekhasan sendiri. Risiko politik Jawa Tengah dinilai relatif rendah karena karakter masyarakat Jawa Tengah yang cenderung lebih lemah lembut sehingga hal ini lebih menguntungkan dari sisi investasi. Dari sisi kebijakan terlihat bahwa investor cukup puas akan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jawa Tengah, termasuk di dalamnya adalah kebijakan menangani COVID-19. Kebijakan yang responsif dan tepat dipandang menjadi kunci untuk menarik investor.

Kata kunci: Investasi, PMA, Jawa Tengah, risiko politik, kelembagaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Masalah	3
1.3.Tujuan dan Manfaat Khusus.....	4
1.4. Keutamaan Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III. METODE PENELITIAN.....	10
BAB IV. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	13
4.1. Perkembangan PMA di Jawa Tengah.....	14
4.2. Perkembangan PMDN Provinsi Jawa Tengah.....	19
4.3. Analisis kualitatif ekonomi kelembagaan dan risiko politik bagi PMA di Jawa Tengah.....	23
4.4.Pentingnya kelembagaan dan politik dalam mendatangkan investasi.....	34
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	36
5.1. Kesimpulan.....	36
5.2. Rekomendasi	36
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
LAMPIRAN.....	vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Izin Prinsip PMA menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jumlah Proyek).....	2
Tabel 2. Lima Izin Prinsip PMA Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah (Nilai Proyek/juta Rupiah).....	3
Tabel 3. Perkembangan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.....	16
Tabel 4. Perkembangan Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.....	17
Tabel 5. Persebaran Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.....	18
Tabel 6. Perkembangan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.	20
Tabel 7. Perkembangan Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.	21
Tabel 8. Persebaran Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.....	22
Tabel 9. Realisasi Penanaman Modal Asing berdasarkan Lokasi	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMDN Provinsi Jawa Tengah 2014-2019*.....	15
Gambar 2. Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMDN Provinsi Jawa Tengah 2014-2019*.....	19

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi secara umum dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada khususnya bisa menjadi salah satu cara untuk menghadapi krisis ekonomi. Adanya PMA dapat merangsang ekspansi teknologi, efisiensi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teori PMA pun bergerak dengan cepat. Pada akhir-akhir ini masalah institusional dan juga kondisi demokrasi menjadi salah satu sorotan dalam penentuan arus PMA ke suatu negara. Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis hubungan antara hak demokrasi fundamental dan PMA. Dengan menggunakan teknik dan periode ekonometrik yang berbeda, Harms dan Ursprung (2002), Jensen (2003), dan Busse dan Hefeker (2007) menemukan bahwa perusahaan multinasional lebih tertarik pada negara-negara demokratis. Mereka menemukan bahwa hak-hak demokrasi terutama mengarah pada perlindungan hak-hak properti yang lebih baik akan dapat meningkatkan investasi asing. Di sisi lain, terdapat juga temuan bahwa peningkatan demokrasi dapat mengurangi PMA.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan investasi di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Tengah salah satunya adalah ketidakmerataan pertumbuhan investasi. Di Jawa Tengah sendiri terdapat delapan wilayah regionalisasi. Adanya regionalisasi ini ternyata memiliki dampak pada perkembangan investasi asing di daerah. Berdasarkan data, investor asing akan cenderung memilih wilayah tertentu yang memiliki infrastruktur, iklim investasi, institusi dan faktor-faktor penentu investasi yang baik dalam pengambilan keputusan investasi.

Kondisi ini memicu terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi yang lebih lebar. Wilayah dengan konsentrasi investasi yang tinggi akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya dengan

wilayah yang kurang diminati oleh investor akan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

Berikut adalah izin prinsip PMA menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**Tabel 1. Izin Prinsip PMA menurut Kabupaten/Kota di Jawa tengah
(Jumlah Proyek)**

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	total
Kab. Jepara	24	49	33	40	45	191
Kt. Semarang	31	31	30	38	41	171
Kab. Semarang	13	14	12	11	17	67
Kab. Sukoharjo	7	8	5	4	12	36
Kab. Demak	6	6	3	9	9	33
Kab. Klaten	5	6	5	5	4	25
Kab. Brebes	3	2	2	7	6	20
Kab. Kendal	4	3	3	8	1	19
Kab. Boyolali	3	5	4	2	2	16
Kt. Surakarta	1	6	3	4	2	16
Kab. Tegal	1	1	3	6	4	15
Kab. Cilacap	5	3	2	2	2	14
Kab. Rembang	1	2	3	3	5	14
Kab. Grobogan	5	2	2	2	2	13
Kab. Karanganyar	2	3	2	1	5	13
Kab. Purbalingga	2	1	4	4	2	13
Kab. Pati	5	3	2		1	11
Kt. Salatiga		3	3	2	3	11
Kab. Wonogiri	2	3	2		2	9
Kab. Batang	1	1	4	1	1	8
Kab. Magelang	1	2	1	1	2	7
Kab. Banyumas	1	2	1	2		6
Kab. Blora	1	1		3	1	6
Kab. Kudus	1		1	2	2	6
Kab. Pemalang		1	2	1	2	6
Kt. Tegal	1	1	1	1	2	6
Kab. Purworejo				1	4	5
Kab. Temanggung	1	1	1	2		5
Kab. Banjarnegara			1	1	2	4
Kab. Pekalongan			2	1	1	4
Kab. Sragen			1		2	3
Kab. Wonosobo					2	2
Kt. Magelang	1	1				2
Kt. Pekalongan		1	1			2

Sumber: DPMPTSP Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pesebaran ijin prinsip di Jawa Tengah terlihat kurang merata. Terdapat kabupaten dan kota yang dari tahun ke tahun hanya mendapat IP yang sangat rendah dan ini menunjukkan bahwa daerah

tersebut kurang diminati oleh investor asing. Kabupaten dan kota yang sangat diminati oleh investor diantaranya adalah Kota Semarang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang. Sedangkan kabupaten kota yang kurang diminati diantaranya adalah Kabupaten Wonosobo, kota Magelang dan Kota Pekalongan.

Tabel 2 menunjukkan nilai proyek PMA untuk lima kabupaten kota dengan nilai PMA tertinggi dan terendah.

Tabel 2. Lima Izin Prinsip PMA Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah (Nilai Proyek/juta Rupiah)

	Kabupaten/Kota	Nilai Proyek
Tertinggi	Kabupaten Cilacap	11.745.933,10
	Kabupaten Jepara	4.759.096,80
	kota Semarang	1.525.209,60
	Kabupaten Sukoharjo	704.264,30
	Kabupaten Brebes	669.997,10
Terendah	Kota Magelang	21.628,30
	Kabupaten Banjarnegara	16.466,20
	Kabupaten Purworejo	8.285,20
	kota Tegal	5.971,80
	Kota Pekalongan	3.598,00

Sumber: DPMPTSP Prov. Jawa Tengah

Masih cukup banyak wilayah di Jawa Tengah yang berada pada kelompok relatif tertinggal. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan distribusi pembangunan antar wilayah Kab./Kota. Ini juga dipengaruhi oleh iklim investasi di masing-masing wilayah. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa iklim investasi tidak hanya dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi namun juga oleh kelembagaan dan risiko politik.

1.2. Permasalahan

Upaya-upaya dalam mendorong peningkatan investasi terutama PMA di Jawa Tengah akan terus dilakukan. Peningkatan PMA bila terealisasi dengan baik, selain dapat meningkatkan realisasi investasi di Jawa Tengah, maka juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di semua wilayah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pemerataan penyebaran realisasi PMA di Jawa Tengah. Beberapa Kabupaten/kota memiliki minat investasi

yang begitu tinggi, namun beberapa kabupaten kota dari tahun ke tahun mengalami investasi yang stagnan dan cenderung sangat rendah. Berdasarkan latar belakang, terdapat dua masalah yang muncul dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kondisi kelembagaan terkait dengan penanaman modal secara umum dan PMA secara khusus di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana risiko politik penanaman modal secara umum dan PMA secara khusus di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana perbandingan kondisi kelembagaan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten dengan PMA tertinggi dan terendah?
4. Bagaimana perbandingan risiko politik penanaman modal di Kabupaten dengan PMA tertinggi dan terendah?
5. Bagaimana kebijakan/regulasi/strategi alternatif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif?

1.3. Tujuan dan Manfaat Khusus

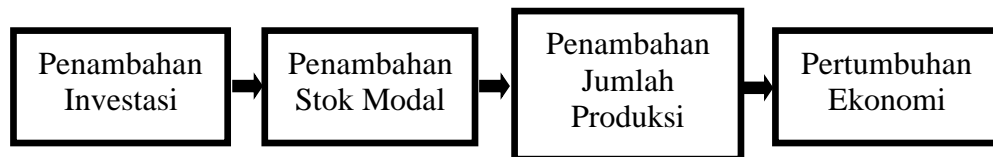
Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis kondisi kelembagaan terkait dengan penanaman modal secara umum dan PMA secara khusus di Provinsi Jawa Tengah?
2. Menganalisis risiko politik penanaman modal secara umum dan PMA secara khusus di Provinsi Jawa Tengah?
3. Menganalisis perbandingan kondisi kelembagaan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten dengan PMA tertinggi dan terendah?
4. Menganalisis perbandingan risiko politik penanaman modal di Kabupaten dengan PMA tertinggi dan terendah
5. Merumuskan alternatif strategi meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi

1.4. Keutamaan penelitian

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam penggerak perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui investasi, kapasitas produksi

nasional dapat ditingkatkan sehingga berdampak pada penyediaan barang dan jasa maupun penyerapan tenaga kerja. Investasi dapat memicu peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan ditampilkan alur peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi.



Namun demikian, keputusan investasi adalah keputusan rasional investor dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. Perhitungan biaya dan manfaat adalah hal yang mendasar dalam keputusan investasi. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap biaya dan manfaat investasi. Diantara berbagai faktor tersebut, faktor kelembagaan dan risiko politik merupakan faktor yang cukup sering muncul dalam diskusi-diskusi dikaitkan dengan masalah *clean and clear*, kemudahan perijinan, jaminan keamanan maupun kemauan politik pemerintah setempat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan slogan “Jawa Tengah Ladang Investasi tahun 2025”. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan penciptaan iklim investasi yang kondusif sehingga investor merasa nyaman dan aman untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena akan memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan strategi menjadikan Jawa Tengah sebagai ladang investasi karena sebagian besar studi mengenai risiko politik dan isu kelembagaan sebagai penentu masuknya investasi lebih berskala nasional dengan menggunakan indikator politik dan kelembagaan yang sudah disediakan oleh Political Risk Services Group (PRSG). Keutamaan penelitian ini muncul karena penelitian dilakukan di tingkat Kabupaten/kota, dan indikator kelembagaan serta risiko politik diperoleh dari penyebaran kuesioner.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Peran investasi adalah menjadi roda penggerak perekonomian. Investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi lainnya merupakan mesin penggerak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas seperti menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi). Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.

Pada prinsipnya, investasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka menambah persediaan jumlah barang modal untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Sementara yang dimaksud dengan persediaan barang modal itu sendiri merupakan jumlah barang modal yang tersedia pada waktu tertentu. Investasi mengakibatkan meningkatnya jumlah barang modal yang memungkinkan bertambahnya barang dan jasa yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Terkait dengan hal ini maka pemerintah perlu membuka peluang investasi seluas-luasnya, termasuk investasi asing terutama investasi pada bidang-bidang usaha penting yang belum mampu dikuasai oleh bangsa Indonesia. Investasi asing akan mendorong terjadinya *technology upgrading* melalui transfer teknologi, perbaikan keahlian dan pengetahuan (*improved skill and knowledge*) tenaga kerja maupun memperluas jaringan usaha (*business network expansion*).

Investasi tetap merupakan keputusan rasional investor yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa studi KPPOD yang dilakukan oleh KPPOD bahwa keinginan politik pemerintah terkait dengan upaya mendatangkan investasi cukup tinggi. Hal tersebut tercermin pada beberapa capaian antara lain pembangunan infrastruktur dan program pengembangan usaha. Namun, masih terdapat fakta-fakta yang menunjukkan lemahnya jaminan perlindungan, usaha dan aksesibilitas lahan di beberapa daerah, ketidakpastian biaya transaksi saat memulai maupun

menjalankan usaha, proses penetapan upah buruh yang rentan terhadap diintervensi kepentingan politik. Fakta-fakta tersebut mengurangi kapasitas institusi dan faktor lokasional yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing perusahaan, produktivitas dan kontribusi investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika terdapat hambatan investasi, maka daya saing secara keseluruhan daerah/nasional serta pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Temuan KPPOD tersebut sejalan dengan temuan Bank Dunia dalam “Doing Business 2019”. Setidaknya terdapat lima permasalahan mendasar terkait dengan keyakinan iklim investasi di Indonesia. Kelima permasalahan tersebut yaitu, (1) investor merasa bahwa peraturan Indonesia mungkin berdampak negatif terhadap bisnis mereka. Peraturan Indonesia untuk melakukan bisnis bisa sangat ketat, terutama untuk perusahaan asing. Walaupun Indonesia menyambut baik investasi asing, Indonesia juga memiliki beberapa aturan, (2) Ketidakefisienan Birokrasi; birokrasi cukup kompleks. Investor harus berinteraksi dengan banyak organisasi dan kementerian yang berbeda dalam proses melakukan bisnis di Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission/OSS (sistem Pengajuan Tunggal Online pada tahun 2018), tetapi masih dibutuhkan beberapa minggu sebelum perusahaan mereka siap untuk diluncurkan, (3) Peraturan Pabean dan Impor yang ketat. Untuk mendapatkan lisensi dan produk yang bisa mereka impor diperlukan waktu lebih dari satu bulan, terutama untuk elektronik konsumen seperti ponsel, komputer genggam, dan tablet, (4) Kebijakan ketenagakerjaan, sekitar 51 persen investor asing khawatir dengan kebijakan tenaga kerja Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah aturan ketat Indonesia tentang mempekerjakan karyawan asing, dan (5) Korupsi. Indeks Keyakinan Bisnis 2019 menemukan bahwa 51 persen investor asing khawatir tentang korupsi, dibandingkan 43 persen pada 2018 dan 49 persen pada 2017.

Terdapat banyak teori PMA yang menggunakan berbagai variabel dan konsep. Studi teoritis sederhana mengenai PMA menyatakan bahwa PMA termotivasi terutama oleh kemungkinan profitabilitas yang tinggi di pasar yang berkembang. Dalam konsep ini, rendahnya tingkat suku bunga di negara tuan rumah, sumber bahan baku yang aman dan hambatan perdagangan yang rendah

merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan konsep ini adalah penelitian Akinkugbe (2003), Benacek et al. (2000), dan Lim (2001).

Teori PMA yang relatif baru menggunakan variabel pasar dan kelembagaan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Bevan, Estrin, dan Meyer (2001) mengatakan bahwa institusi sangat penting bagi operasi ekonomi pasar dan memfasilitasi operasi bisnis, seperti pengembangan sektor swasta, reformasi sektor perbankan, dan pengembangan hukum. Dumludag, Saridogan, dan Kurt (2007); Busse dan Hefeker (2007), dan Chen dan Funke (2008) juga menemukan bahwa lingkungan politik yang tidak stabil dapat menjadi penghalang investasi yang signifikan.

Salah satu ukuran variabel kelembagaan membutuhkan pengukuran kualitatif. Political Risk Services Group (PRSG) memberikan panduan pengukuran risiko politik untuk level negara dalam International Country Risk Guide (ICRG) dengan 12 indikator risiko sebagai berikut:

1. Stabilitas pemerintah, mengukur kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan
2. Tekanan sosial ekonomi di masyarakat yang dapat mengacaukan dan menahan tindakan pemerintah
3. Penilaian investasi, faktor-faktor yang terkait dengan risiko investasi yang tidak tercakup oleh komponen risiko keuangan dan ekonomi, seperti kelayakan kontrak, repatriasi keuntungan.
4. Konflik internal, mengukur konflik politik di dalam negara seperti terorisme, perang saudara dll
5. Konflik eksternal
6. Korupsi
7. Militer
8. Ketegangan Agama, yang berasal dari dominasi masyarakat dan / atau diatur oleh satu kelompok agama yang mencari
9. Hukum dan ketertiban
10. Etnis menilai tingkat ketegangan antar kelompok etnis

11. Pertanggungjawaban pemerintah yang demokratis
12. Kekuatan kelembagaan dan kualitas birokrasi

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *mixed method* yaitu antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran penanaman modal asing di Jawa Tengah, baik dalam bentuk proporsi dan tren investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menggali persepsi kondisi kelembagaan dan risiko politik dari investor asing. Metode kualitatif juga digunakan untuk membandingkan kondisi penanaman modal antara kabupaten/kota dengan PMA tertinggi dan terendah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder untuk keperluan analisis kuantitatif diperoleh dari BPS, BI, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk level Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait.

Sedangkan data primer untuk keperluan analisis kualitatif diperoleh melalui kuesioner dan *in-depth interview*. Pengujian dengan menggunakan kuesioner bertujuan untuk melakukan komparasi persepsi investor mengenai risiko politik dan kelembagaan di Kabupaten/Kota dengan PMA tertinggi dan terendah yaitu Kabupaten Jepara dan Kota Semarang sebagai wilayah dengan PMA tertinggi dan Kabupaten Purworejo dan Kota Pekalongan mewakili wilayah dengan PMA terendah. Pemilihan responden untuk kuesioner adalah investor asing yang secara aktif mengelola investasinya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masing-masing Kabupaten/Kota diwakili oleh 10 responden. Teknis pengumpulan data adalah dengan memberikan kuesioner yang bersifat fisik ke masing-masing lokasi usaha, selain itu kuesioner juga akan dibagikan secara online dengan menggunakan surat elektronik. Selain itu, pimpinan DPMPTSP juga akan mengisi kuesioner yang sama dengan maksud melihat ada tidaknya kesesenjangan atau perbedaan persepsi antara investor dengan OPD terkait. Hal ini berguna dalam perumusan rekomendasi strategi.

Kuesioner akan diadaptasi dan dikembangkan dari variabel yang digunakan ICRG. Variabel dan indikator yang digunakan adalah:

1. Stabilitas pemerintah, mengukur kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan, keselarasan dalam implementasi kebijakan, keterbatasan pemerintah dalam menghadapi tekanan sosio-ekonomi, dan dukungan yang diberikan
2. Kondisi sosio-ekonomi, tekanan sosial ekonomi di masyarakat yang dapat mengacaukan dan menahan tindakan pemerintah seperti : tingkat pengangguran, kepercayaan konsumen, dan kemiskinan
3. Penilaian investasi, faktor-faktor yang terkait dengan risiko investasi yang tidak tercakup oleh komponen risiko keuangan dan ekonomi, seperti : kelayakan kontrak, repatriasi keuntungan, serta penundaan pembayaran
4. Konflik internal, mengukur konflik politik di dalam wilayah provinsi Jawa Tengah seperti: terorisme, perang saudara, kerusuhan sipil
5. Konflik eksternal, mengukur konflik dengan wilayah provinsi lain seperti : perang, konflik lintas dagang, tekanan dari pihak eksternal
6. Korupsi, mengukur ada tidaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
7. Militer, mengukur keterlibatan pihak militer dalam investasi yang dilihat dari peran militer dalam meminimalisir risiko politik
8. Ketegangan antar-agama, mengukur dominasi kelompok agama tertentu untuk mengganti hukum negara dengan hukum agama dan mengabaikan kepercayaan/agama lain
9. Hukum dan ketertiban, mengukur kekuatan dan keberpihakan sistem hukum serta ketaatan terhadap hukum.
10. Etnis, mengukur tingkat ketegangan antar kelompok etnis (ras, kebangsaan, bahasa)
11. Akuntabilitas demokratis, mengukur tingkat responsivitas pemerintah terhadap masyarakatnya
12. Kekuatan kelembagaan dan kualitas demokrasi, mengukur dampak dari revisi kebijakan ketika terjadi perubahan pemerintahan.

In-depth interview akan dilakukan dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan pemilihan investor dengan asosiasi pengusaha seperti APINDO, KADIN dan HIPMI dan atau DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah agar

dapat diperoleh responden yang kompeten dan mengetahui dengan baik kondisi iklim investasi di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten/Kota. Jumlah responden *in-depth interview* per Kabupaten/kota adalah sebanyak tiga orang investor asing, satu orang perwakilan DPMPTSP, satu orang dari asosiasi yang terkait dengan bisnis. *In-depth interview* adalah salah satu teknik pengambilan data yang bersifat kualitatif. Umumnya, pewawancara akan memberikan pertanyaan terbuka sebagai pengantar namun pertanyaan akan berkembang jika pewawancara menemukan fakta atau opini yang menarik terkait dengan fenomena yang diteliti. Peneliti berniat mengetahui persepsi dari investor individual mengenai kelembagaan, iklim investasi di wilayah Kabupaten/Kota terkait serta Provinsi Jawa Tengah, faktor terpenting yang mempengaruhi investasi, hambatan/potensi risiko terbesar yang dihadapi selama berinvestasi, serta harapan/potensi perbaikan yang mungkin dilakukan oleh asosiasi, pemerintah daerah maupun provinsi. Asosiasi sebagai perwakilan dari bisnis diharapkan dapat merepresentasikan persepsi investor secara keseluruhan mengenai iklim investasi di wilayah Kabupaten/Kota terkait serta Provinsi Jawa Tengah, faktor terpenting yang mempengaruhi investasi, hambatan/potensi risiko terbesar yang dihadapi selama berinvestasi, serta harapan/potensi perbaikan yang mungkin dilakukan oleh asosiasi, pemerintah daerah maupun provinsi. Dengan melakukan IDI pada investor individual dan asosiasi, peneliti dapat melihat ada tidaknya kesesuaian antara persepsi investor individual dan keseluruhan investor di dalam organisasi. Selain itu, peneliti juga akan melakukan IDI pada pemerintah terkait dalam hal ini diwakili DPMPTSP tingkat Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan investor. Dengan melakukan IDI, maka diharapkan dapat melihat persepsi pemerintah mengenai iklim investasi di wilayah Kabupaten/Kota terkait serta Provinsi Jawa Tengah, kelemahan dan kelebihan sistem pelayanan yang telah dilakukan, hal-hal yang sering dikeluhkan investor, usulan perbaikan yang mungkin dilakukan oleh asosiasi, pemerintah daerah maupun provinsi.

BAB IV. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk mengetahui tujuan penelitian berikut:

1. Menganalisis kondisi kelembagaan terkait dengan penanaman modal secara umum dan PMA secara khusus di Provinsi Jawa Tengah?
2. Menganalisis risiko politik penanaman modal secara umum dan PMA secara khusus di Provinsi Jawa Tengah?
3. Menganalisis perbandingan kondisi kelembagaan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten dengan PMA tertinggi dan terendah?
4. Menganalisis perbandingan risiko politik penanaman modal di Kabupaten dengan PMA tertinggi dan terendah
5. Merumuskan alternatif strategi meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi

Namun pada kenyataan di lapangan, karena adanya pandemic COVID-19 kami tim peneliti ternyata tidak mampu mendapatkan hasil dari sebagian tujuan penelitian, terutama untuk data primer. Pada awalnya rencana tim peneliti adalah menyebarkan kuesioner melalui google form, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara mendalam, baik untuk PMA maupun dinas terkait dengan penanaman modal. Tim peneliti, setelah melakukan kontak kepada responden kemudian mengirimkan 20 kuesioner. Namun ternyata sampai bulan Juni tidak ada satu pun yang kembali dan menjawab. Sebagian besar tidak menjawab sama sekali, sebagian lagi menjanjikan tetapi ternyata tidak ada tindak lanjut. Tim peneliti tidak dapat melakukan kunjungan ke PMA tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang meskipun tidak sama dengan tujuan penelitian, tim peneliti melakukan wawancara melalui Whatsapp dengan jumlah responden secara terbatas.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Maka dalam laporan penelitian ini yang dapat dilakukan tim peneliti adalah:

1. Menggunakan data sekunder untuk memberikan gambaran atas kondisi penanaman modal di Jawa Tengah. Tim peneliti memasukkan juga data

PMDN, tidak hanya PMA dengan alasan, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Bila trend dari data sekunder mengalami kenaikan hal tersebut mengindikasikan secara kelembagaan dan kondisi politik, Jawa Tengah merupakan daerah yang ramah investasi, karena ketika kondisi politik dan kelembagaan buruk, maka investasi tidak akan masuk ke Jawa Tengah

2. Menggunakan hasil wawancara melalui Whatsapp, dengan jumlah responden yang sangat terbatas, untuk memberikan gambaran kualitatif mengenai kondisi kelembagaan dan politik
3. Menggali best practice atas penanaman modal dari daerah lain, yang diharapkan akan dapat memberikan inspirasi rekomendasi mengenai apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi dari sisi kelembagaan dan politik.

Tim peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian menjadi berbeda dengan tujuan awal. Namun itulah upaya terbaik yang dapat tim peneliti lakukan dalam masa pandemic ini.

4.1. Perkembangan PMA Provinsi Jawa Tengah

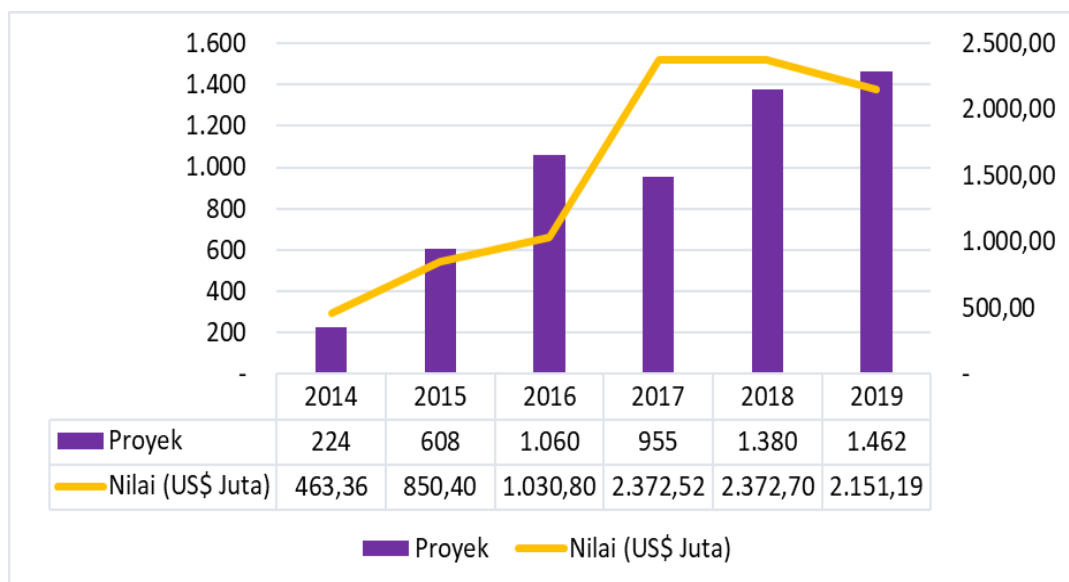
Belanja oleh sektor swasta dalam bentuk investasi merupakan salah satu roda penggerak perekonomian yang sangat diharapkan, terutama ketika pengeluaran pada sektor rumah tangga, dan eksternal terjadi penurunan serta sektor pemerintah mengalami defisit yang semakin besar. Investasi diharapkan tetap dapat memacu pertumbuhan ekonomi terutama dalam kondisi ekonomi yang terdampak COVID 19 seperti saat penelitian ini dilakukan. Melalui investasi diharapkan kapasitas produksi nasional dapat dipertahankan sehingga ketersediaan barang dan jasa maupun penyerapan tenaga kerja terjaga.

Investasi merupakan komitmen investor atas sejumlah dana atau sumber daya lain saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang, atau penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu/ Oleh karena itu, investasi tetap merupakan keputusan rasional investor dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap biaya dan manfaat investasi.

Diantara berbagai faktor tersebut, faktor kelembagaan dan risiko politik merupakan faktor yang cukup sering muncul dalam diskusi-diskusi dikaitkan dengan masalah *clean and clear*, kemudahan perijinan, jaminan keamanan maupun kemauan politik pemerintah setempat. Menyadari pentingnya peran investasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menjadi ladang investasi. Paparan berikut ini menyajikan kinerja investasi yang mencerminkan hasil dari berbagai upaya menciptakan iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1 menyajikan perkembangan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2019-triwulan III. Baik nilai maupun jumlah proyek PMA di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2014 – 2019 (triwulan III) cenderung meningkat dengan laju yang sangat tinggi. Pada tahun 2014, nilai proyek PMA hanya sebesar USD 463,36 juta, pada tahun 2018 sebesar USD 2.373,70 dan pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III telah mencapai USD 2.151,19 juta.

Gambar 1. Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMDN Provinsi Jawa Tengah 2014-2019*



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Keterangan: *) sampai dengan triwulan III

Lima sektor dengan nilai investasi PMA terbesar adalah sektor Listrik, Gas dan Air, Industri Barang dari Kulit dan Alas kaki, Industri Kendaraan Bermotor dan

Transportasi lainnya, Industri Tekstil, dan Industri Makanan. Sementara itu, sektor-sektor dengan nilai investasi terbesar selama periode 2014 – 2019-triwulan III antara lain sektor Listrik, Gas dan Air, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi, Industri Tekstil, dan Industri Makanan. Hal yang sangat penting untuk disermati adalah investasi pada sektor energi (Listrik, Gas, dan Air). Nilai investasi PMA pada sektor energi sangat dominan pada tahun-tahun terakhir pengamatan. Pada tahun 2014 dan 2015 investasi pada sektor tersebut hanya berkontribusi sebesar 2,76 persen dan 2,78 persen. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga kontribusinya meningkat menjadi 45,28 persen pada tahun 2016, 45,48 persen pada tahun 2017, bahkan menjadi sangat dominan pada tahun 2018 dan 2019 dengan kontribusi sebesar 78,15 persen dan 86,79 persen. Permasalahannya adalah, mengenai kelanjutan investasi PMA pada sektor energi selanjutnya. Ketika investasi pada sektor energi ini sudah habis, maka akan terjadi penurunan investasi yang sangat besar dan dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, yakni kemungkinan terjadinya kontraksi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

NO	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2.018	2019*
1	Hotel dan Restoran	25,23	15,38	25,46	17,07	4,55	2,37
2	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	7,52	2,33
3	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	56,20	7,62	2,22	4,65	-	-
4	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	92,41	58,83
5	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	1,62	-	-
6	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	0,64	2,28	1,53	5,34	14,30	2,89
7	Industri Kayu	1,65	2,64	22,67	269,08	13,94	3,08
8	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	3,89	52,89
9	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	0,73	9,32	1,18	17,47	9,03	6,15
10	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	138,31	96,43	129,88	15,43	61,21	9,37
11	Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu	6,20	15,59	84,22	189,54	-	-
12	Industri Lainnya	18,21	24,51	20,39	377,43	38,01	18,24
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	18,53	2,23	5,24	21,31	1,94	0,86
14	Industri Makanan	102,27	95,92	44,93	16,89	24,64	36,86
15	Industri Mineral Non Logam	0,27	0,52	0,24	0,03	2,38	0,07
16	Industri Tekstil	56,95	209,24	131,36	145,04	123,10	38,75
17	Jasa Lainnya	0,40	4,87	34,88	15,54	1,21	4,88
18	Kehutanan	-	-	0,26	0,16	0,03	2,57
19	Konstruksi	-	11,11	3,10	1,37	0,23	0,45
20	Listrik, Gas dan Air	12,77	23,66	466,76	1.079,11	1.854,36	1.866,95
21	Perdagangan dan Reparasi	13,13	13,27	5,39	19,74	6,08	5,70

NO	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2.018	2019*
22	Perikanan	-	0,18	0,02	4,68	1,25	0,42
23	Pertambangan	3,55	0,53	8,78	25,16	55,25	4,46
24	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	0,16	49,24	19,54	13,68	47,75	6,41
25	Peternakan	3,71	1,00	5,37	101,51	-	-
26	Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	-	4,26	-	4,52	0,14
27	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	4,45	264,84	13,12	30,68	5,12	26,49
	JUMLAH	463,36	850,40	1.030,80	2.372,52	2.372,70	2.151,19

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Keterangan: *) sampai dengan triwulan III

Menurut jumlah proyek PMA, lima sektor dengan jumlah proyek PMA terbanyak pada tahun 2019 adalah sektor perdagangan dan Reparasi, Industri Tekstil, Industri Makanan, Industri Kayu dan Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sektor-sektor tersebut juga cenderung menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

NO	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hotel dan Restoran	6	14	57	67	79	52
2	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam					35	30
3	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1	5	3	8		
4	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki					66	68
5	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	1		2	2		
6	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	3	13	21	21	43	46
7	Industri Kayu	13	24	49	51	81	92
8	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain					10	11
9	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	6	13	20	27	44	58
10	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	12	33	59	45	63	58
11	Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu	6	16	44	39		
12	Industri Lainnya	60	144	235	206	288	302
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	8	26	46	33	16	17
14	Industri Makanan	24	57	91	74	86	110
15	Industri Mineral Non Logam	1	8	7	2	1	1
16	Industri Tekstil	39	117	149	132	221	203
17	Jasa Lainnya	6	12	32	29	56	67
18	Kehutanan	1	2	4	2	2	5
19	Konstruksi	2	2	4	4	4	1
20	Listrik, Gas dan Air	2	8	22	17	32	19
21	Perdagangan dan Reparasi	20	77	139	123	167	252
22	Perikanan	1	5	20	11	16	20
23	Pertambangan	3	15	14	6	11	6
24	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	6	16	35	34	20

NO	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	Peternakan	2	4	12	11		
26	Tanaman Pangan dan Perkebunan	2		4	4	18	17
27	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	7	10	6	7	7
	JUMLAH	224	608	1.060	955	1.380	1.462

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

PMA berdasarkan daerah tujuan di Provinsi Jawa tengah menunjukkan bahwa lima kabupaten/Kota dengan jumlah proyek PMA terbanyak adalah Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sukoharjo (Tabel 5).

Tabel 5. Persebaran Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Banjarnegara			5	10	18	15
2	Kabupaten Banyumas	1	5	13	71	132	92
3	Kabupaten Batang	3	3	1	18	59	44
4	Kabupaten Blora	2	1	1	40	10	13
5	Kabupaten Boyolali		6	17	48	66	82
6	Kabupaten Brebes	1	6	1	7	18	27
7	Kabupaten Cilacap	2	5	17	17	39	43
8	Kabupaten Demak	10	32	57	89	142	129
9	Kabupaten Grobogan	3	7	8	16	38	19
10	Kabupaten Jepara	1	5	12	26	29	31
11	Kabupaten Karanganyar	9	29	47	75	136	121
12	Kabupaten Kebumen		1	58	21	52	47
13	Kabupaten Kendal	1	5	9	9	20	40
14	Kabupaten Klaten	1	5	21	30	67	60
15	Kabupaten Kudus	5	11	61	154	232	237
16	Kabupaten Magelang	1	2	11	18	31	44
17	Kabupaten Pati	5	11	35	25	33	72
18	Kabupaten Pekalongan	2	10	33	24	28	21
19	Kabupaten Pemalang		1	6	11	35	17
20	Kabupaten Purbalingga		4	12	9	22	28
21	Kabupaten Purworejo	2	1	6	5	24	24
22	Kabupaten Rembang	3	8	9	23	55	45
23	Kabupaten Semarang	13	31	38	84	133	128
24	Kabupaten Sragen	18	28	36	93	112	54
25	Kabupaten Sukoharjo	10	34	43	44	118	158
26	Kabupaten Tegal	1	3	9	32	48	29
27	Kabupaten Temanggung		3	8	16	32	17
28	Kabupaten Wonogiri	2	541	301	169	165	210
29	Kabupaten Wonosobo		1	3	8	21	18
30	Kota Magelang			3	10	13	19
31	Kota Pekalongan	8	5	8	16	16	33

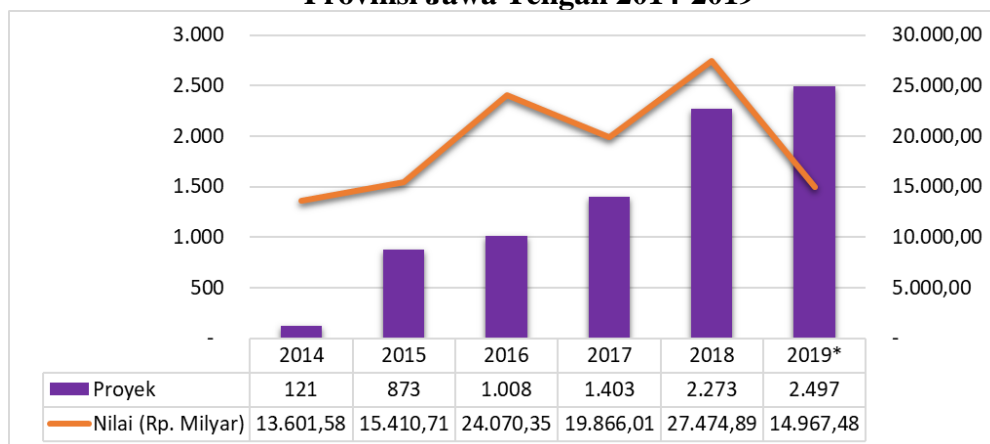
No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
32	Kota Salatiga	1	4	7	19	41	55
33	Kota Semarang	13	56	93	138	239	418
34	Kota Surakarta	3	9	16	22	32	85
35	Kota Tegal			3	6	17	22
	JUMLAH	121	873	1.008	1.403	2.273	2.497

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Perkembangan PMDN Provinsi Jawa Tengah

Seperti halnya perkembangan PMA, perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Tengah memiliki pola yang sedikit berbeda dengan pola perkembangan PMA. Dilihat dari sisi jumlah proyek, PMDN di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Namun, jika dilihat pada nilai investasinya, PMDN di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai investasi PMDN tercatat Rp. 13.601,58 Milyar, meningkat pada tahun 2015 (sebesar Rp.15.410,71 Milyar). Nilai investasi PMDN pada tahun 2016 bahkan sebesar hampir dua kali nilai investasi tahun 2015 dengan nilai investasi Rp. 24.070,35 Milyar. Selanjutnya, nilai investasi PMDN menurun pada tahun 2017 dengan nilai Rp. 19.866,01 Milyar dan kembali meningkat pada tahun 2018 (sebesar Rp. 27.474,89 Milyar). Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III, nilai investasi PMDN tercatat Rp. 14.967,48 Milyar.

Gambar 2. Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMDN Provinsi Jawa Tengah 2014-2019*



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Keterangan: *) sampai dengan triwulan III

Berdasarkan sektor atau jenis industrinya, sektor-sektor dengan nilai investasi PMDN terbesar adalah sektor Industri Makanan, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Jasa lainnya, Industri Tekstil, Perdagangan dan Reparasi serta Hotel dan Restoran. Nilai investasi pada industri tekstil cukup fluktuatif selama tahun pengamatan, namun masih cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Industri Makanan secara tren mengalami penurunan. Sementara itu, untuk sektor/industri terbesar lainnya, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Jasa lainnya, Perdagangan dan Reparasi serta Hotel dan Restoran secara tren cenderung meningkat. Laju peningkatan tercepat terjadi pada sektor Hotel dan Restoran.

Tabel 6. Perkembangan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

No	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hotel dan Restoran	31,80	14,93	9,91	632,78	1.385,48	526,57
2	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	11,75	12,67
3	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1,73	-	13,88	91,97	-	-
4	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	141,82	27,44
5	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	0,15	-	-
6	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	168,77	184,56	434,12	517,41	201,86	195,98
7	Industri Kayu	20,04	152,97	342,79	345,32	226,20	71,44
8	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	310,49	72,12
9	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	49,43	760,16	169,84	478,41	321,17	289,74
10	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10,80	57,50	11.439,71	258,31	2.056,35	307,21
11	Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu	-	-	3,10	76,28	-	-
12	Industri Lainnya	4,36	1,34	10,04	124,68	69,51	165,06
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	53,61	27,49	559,29	405,68	88,88	30,03
14	Industri Makanan	1.962,99	2.156,55	2.695,18	2.650,45	666,50	1.157,67
15	Industri Mineral Non Logam	3.139,26	5.450,51	1.829,05	449,30	714,69	235,33
16	Industri Tekstil	1.265,34	1.970,39	1.492,18	4.006,85	2.407,80	594,01
17	Jasa Lainnya	0,99	188,89	77,18	1.383,64	599,74	852,92
18	Kehutanan	-	-	189,54	-	-	#VALUE!
19	Konstruksi	-	93,36	32,57	14,10	7.089,40	31,62
20	Listrik, Gas dan Air	6.544,55	4.133,65	984,38	686,59	4.932,70	8.345,89
21	Perdagangan dan Reparasi	113,07	32,02	193,81	392,54	476,11	569,75
22	Perikanan	-	-	-	2,43	14,84	8,76
23	Pertambangan	8,00	2,30	11,68	154,65	980,35	0,08
24	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	166,02	45,80	43,94	489,11	564,11	912,70

No	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	Peternakan	57,88	34,16	21,76	31,33	-	-
26	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1,15	-	-	7,30	83,29	123,40
27	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1,78	104,15	3.516,40	6.666,71	4.131,84	437,11
	JUMLAH	13.601,58	15.410,71	24.070,35	19.866,01	27.474,89	14.967,48

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Secara berturut-turut, jumlah proyek PMDN sektoral terbesar adalah sektor Perdagangan dan Reparasi, Industri Makanan, Jasa lainnya, Industri Tekstil, Hotel dan Restoran serta Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik. Sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan tercepat pada sektor perdagangan, Industri Makanan Hotel dan Restoran.

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

No	SEKTOR	2014	2015	2016	2017	2018	Proyek
1	Hotel dan Restoran	1	27	28	80	88	126
2	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam					72	55
3	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	2	5	9	16		
4	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki					11	6
5	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam				3		
6	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	19	60	70	111	123	125
7	Industri Kayu	4	26	49	64	99	86
8	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain					24	25
9	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	3	19	33	44	69	63
10	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	4	19	30	57	105	109
11	Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu		2	5	3		
12	Industri Lainnya	2	8	13	40	75	66
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	6	11	32	52	28	29
14	Industri Makanan	15	127	148	153	299	320
15	Industri Mineral Non Logam	8	29	29	29	65	51
16	Industri Tekstil	24	60	92	127	243	223
17	Jasa Lainnya	4	72	44	92	186	264
18	Kehutanan			2			2
19	Konstruksi	1	64	129	59	73	103
20	Listrik, Gas dan Air	4	12	26	26	51	46
21	Perdagangan dan Reparasi	13	217	182	238	361	597
22	Perikanan			1	3	3	8
23	Pertambangan	1	3	9	61	95	15
24	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	36	20	53	72	58
25	Peternakan	1	14	5	11		
26	Tanaman Pangan dan Perkebunan	2	3	1	7	46	53
27	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2	59	51	74	85	67
	JUMLAH	121	873	1.008	1.403	2.273	2.497

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Terkait dengan persebarannya, persebaran PMDN baik menurut nilai investasi maupun jumlah proyeknya cenderung sangat timpang. Lima Kabupaten kota dengan nilai investasi terbesar adalah Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Nilai investasi pada kelima Kabupaten/Kota tersebut telah mencapai lebih dari 50 persen total nilai investasi PMDN di Jawa Tengah. Bahkan dua Kabupaten/Kota dengan nilai investasi terbesar tersebut memperoleh bagian sekitar 50 persen, dan sebesar 70,19 persen pada triwulan III-2019. Dilihat dari jumlah proyek PMDN, lima Kabupaten Kota terbesar adalah Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak dan Kabupaten Karanganyar. Persebaran jumlah proyek menurut Kabupaten/Kota ini dapat dikaitkan dengan persebaran proyek PMDN menurut sektor, yakni sektor Perdagangan dan Reparasi, Industri Makanan, Jasa lainnya, Industri Tekstil, serta Hotel dan Restoran.

Tabel 8. Persebaran Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Banjarnegara	-	-	20,22	50,65	148,61	166,87
2	Kabupaten Banyumas	2.828,82	103,70	119,90	441,64	614,64	301,98
3	Kabupaten Batang	4,45	175,88	-	321,42	544,15	231,46
4	Kabupaten Blora	676,80	-	-	100,36	13,25	0,05
5	Kabupaten Boyolali	-	499,51	1.024,11	474,46	1.113,60	367,28
6	Kabupaten Brebes	2,58	12,73	-	62,91	67,55	33,86
7	Kabupaten Cilacap	6.385,75	4.133,54	12.162,08	395,27	4.805,12	6.789,98
8	Kabupaten Demak	589,22	521,46	1.003,81	758,55	463,88	222,33
9	Kabupaten Grobogan	18,49	2.423,35	28,72	309,51	215,71	106,13
10	Kabupaten Jepara	33,63	41,59	21,99	56,97	8,37	6,70
11	Kabupaten Karanganyar	83,68	420,55	1.875,25	1.957,68	989,04	81,05
12	Kabupaten Kebumen	-	84,13	41,41	17,07	71,42	67,56
13	Kabupaten Kendal	-	-	-	4,57	311,71	127,46
14	Kabupaten Klaten	5,74	20,60	62,39	247,33	229,79	189,28
15	Kabupaten Kudus	806,76	1.265,49	881,54	1.034,98	687,19	158,72
16	Kabupaten Magelang	47,36	-	30,64	185,03	125,48	187,86
17	Kabupaten Pati	73,04	47,13	1.254,32	889,76	106,17	216,56
18	Kabupaten Pekalongan	37,97	138,19	1.373,60	5.907,35	1.241,01	49,93
19	Kabupaten Pemalang	-	-	252,73	2,03	103,36	39,45
20	Kabupaten Purbalingga	-	4,29	19,78	45,77	9,10	4,09

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	Kabupaten Purworejo	-	-	-	13,94	113,21	11,17
22	Kabupaten Rembang	0,10	2.705,25	1.550,50	74,04	427,81	112,67
23	Kabupaten Semarang	174,72	1.690,73	222,32	1.339,48	2.141,90	521,81
24	Kabupaten Sragen	697,92	76,07	965,15	999,42	2.441,48	9,96
25	Kabupaten Sukoharjo	347,35	478,27	234,78	2.055,38	1.107,15	905,94
26	Kabupaten Tegal	-	39,75	93,15	404,47	59,57	22,20
27	Kabupaten Temanggung	-	-	52,10	165,80	93,39	1,25
28	Kabupaten Wonogiri	7,32	299,34	222,71	41,83	42,57	44,50
29	Kabupaten Wonosobo	-	16,26	-	1,69	16,13	12,42
30	Kota Magelang	-	-	13,74	164,19	12,97	21,34
31	Kota Pekalongan	2,54	-	15,62	51,26	96,12	22,86
32	Kota Salatiga	258,00	-	4,15	98,60	121,93	20,61
33	Kota Semarang	422,95	211,13	501,74	1.129,04	8.534,75	3.715,28
34	Kota Surakarta	96,38	1,77	11,66	29,26	383,30	165,71
35	Kota Tegal	-	-	10,24	34,33	13,49	31,17
	JUMLAH	13.601,5 8	15.410,7 1	24.070,3 5	19.866,0 1	27.474,8 9	14.967,4 8

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Analisis kualitatif ekonomi kelembagaan dan risiko politik bagi PMA di Jawa Tengah

Seperti diungkapkan dalam bagian awal bab 4, penelitian ini mengalami hambatan dan keterbatasan. Sehingga secara kualitatif, tim peneliti akan memilih analisis kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran best practice dari daerah-daerah investasi lain.

4.3.1. Hasil Wawancara

Karena keterbatasan yang terjadi akibat pandemi Covid 19, maka tim peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan melakukan wawancara melalui media telekomunikasi. Narasumber yang menjadi fokus pada penelitian ini Dinas, asosiasi bisnis, serta secara acak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Jawa Tengah. Pertanyaan awal yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 1) bagaimana risiko politik di Jawa Tengah?, 2) bagaimana pengaruh risiko politik tersebut terhadap keputusan investasi?, 3) hal paling penting apakah yang harus diperbaiki untuk menarik investor?

Tim Peneliti menitikberatkan pada faktor risiko sebagai faktor yang mempengaruhi investasi karena tidak seperti faktor misalnya infrastruktur, lokasi geografis maupun insentif yang dapat dikuantifikasi, diamati, dan dirasakan, faktor

risiko cenderung sulit diamati namun dapat dirasakan. Untuk memahami mengenai persepsi semua pihak mengenai risiko politik di Jawa Tengah maka tim peneliti melakukan wawancara pada asosiasi bisnis yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Asosiasi bisnis menyatakan bahwa faktor risiko politik menjadi faktor penting penentu investasi. Meski begitu, risiko politik nasional tidak dapat digeneralisasi pada level daerah karena risiko politik nasional akan ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing daerah berdasar karakteristik masing-masing daerah.

“Politik memang sangat menjadi pertimbangan. Risiko politik ditingkat daerah sangat diwarnai oleh pusat, yang secara kedaerahan akan sangat berbeda dalam merespon, karena setiap daerah punya karakter berbeda yang tidak dapat digeneralisasi.” (Didik Sukmono, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi)

Apabila ditarik dalam konteks Provinsi Jawa Tengah maka risiko politik regional dinilai relatif rendah karena karakter masyarakat Jawa Tengah yang cenderung lebih lemah lembut.

“Untuk provinsi Jawa Tengah, risiko politik relatif rendah karena sifat orang Jateng yang cenderung “nrimo ing pandum” (menerima sesuai yang sudah diberikan). Pesta demokrasi mungkin agak panas/heboh di daerah lain, tetapi orang Jawa Tengah cenderung kalem, tidak banyak demo-demo.” (Didik Sukmono, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi)

Namun, apabila faktor risiko nasional dan regional diperbandingkan sebagai faktor yang mempengaruhi investasi maka investor akan menitiberatkan pada risiko investasi nasional karena ini akan berdampak masif pada seluruh kebijakan investasi asing, Selanjutnya mengenai pemilihan regional, investor hanya akan menerima rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, meskipun ia tetap memiliki kehendak bebas menentukan lokasi investasi. Dengan kata lain faktor faktor risiko regional sifatnya *given*.

“Namun sekali lagi, politik pusat sangat berpengaruh. Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan pilkada serentak (dari Presiden sd Gubernur/Bupati-Wali

kota, WAIT N SEE investor akan sangat kuat, karena siapa yang akan menjadi presiden lebih menjadi pertimbangan dalam memutuskan investasi. Bahkan, ketika Presiden terpilih telah ditetapkan, investor masih akan menunggu pembentukan kabinet.

Ketika berbicara khusus mengenai PMA, di daerah hanya menerima alokasi PMA dari pusat. PMA akan melewati BKPM dan BKPM yang akan mengarahkan investor tersebut ke provinsi mana.” (Didik Sukmono, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi)

Saat ini, risiko politik nasional dapat dilihat dari berbagai kebijakan telah dibuat. Penolakan pemberlakuan RUU Cipta Kerja di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Hal ini mendorong buruh melalui serikat pekerja untuk turun ke jalan menyalurkan aspirasi mereka sehingga produktivitas perusahaan menjadi terkendala. RUU Cipta Kerja ini dianggap menguntungkan pengusaha mulai dari penggunaan *activity-based* sebagai dasar pengupahan menggantikan Upah Minimum, kemudahan pemberhentian sepihak dan lain sebagainya,

“(Persepsi risiko investor asing) ditentukan bagaimana kebijakan pemerintah dan sikap (dan dan kebijakan) pemerintahan Provinsi Jateng menyikapi kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan budaya dan culture penduduk Jateng.” (Perwakilan PT. Miko Oil Export)

“Pengaruh politik tingkat pusat juga dapat dilihat dalam kasus OMNIBUS LAW. Pemerintah sepertinya senang membuat wacana, dilempar ke masyarakat tetapi tidak siap dengan berbagai macam respon yang justru meningkatkan ketidakpastian. Wacana sepertinya untuk mengukur respon masyarakat saja.” (Didik Sukmono, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi)

Terkait dengan pandemi Covid 19, secara umum terjadi penurunan daya beli masyarakat sehingga pemerintah perlu menjaga iklim usaha dengan merilis berbagai stimulus dan insentif. Secara khusus melalui Kementerian Keuangan, insentif pajak diberikan yang mencapai Rp 123,01 triliun. Meski begitu, pelaku usaha menilai berbagai stimulus yang dilakukan belum tepat sasaran. Stimulus yang dibutuhkan

adalah berbagai stimulus riil yang berdampak langsung pada ekonomi. Misalnya perusahaan diberikan stimulus untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga daya beli masyarakat terjaga. Investor asing juga menunggu langkah proaktif dari Pemerintah Daerah untuk memberikan stimulus sesuai kewenangannya.

“Maka, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang membuat perusahaan tidak melakukan PHK, misal: 1) penagguhan iuran BPJS (hanya ditangguhan sampai dengan situasi normal, dianggap sebagai utang yang akan diangsur setelah normal...bukan dibebaskan), 2) relaksasi Pajak, pada masa Covid ada baiknya PTKP dinaik. Dalam hal ini pemerintah sepertinya sudah melakukan tetapi kurang sosialisasi, 3) memberi keringanan pada perusahaan padat karya namun menggunakan energi (misal subsidi energi listrik), karena PLN adalah BUMN.” (Didik Sukmono, Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi)

Meski begitu, dampak dari pandemi Covid 19 seharusnya dapat diturunkan karena pada akhir tahun dilakukan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah. Hal ini kan meningkatkan suplai bantuan kepada masyarakat dari calon kepala daerah. Selain itu pelaksanaan Pilkada akan menggerakkan ekonomi masyarakat misalnya industri konveksi ataupun barang sehari-hari. Hingga saat ini masih belum diketuk keputusan final mengenai pelaksanaan Pilkada. Pemerintah mengatakan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan, penundaan pelaksanaan Pilkada hingga waktu tempo yang tidak diketahui akan mempengaruhi keputusan penanggulangan pandemi Covid karena wewenang seorang Pelaksana Tugas (PLT) akan sangat terbatas. Meski begitu, beberapa pihak lain menyatakan jika hal ini tidak dilakukan sesuai protokol kesehatan maka akan sangat berbahaya baik dalam mobilisasi massa (kampanye) maupun pelaksanaan pemungutan suara,

“Dalam waktu dekat akan diadakan pilkada bulan Desember 2020 politisi seharusnya terjun kemasyarakat untuk membantu permasalahan covid ini karena masyarakat konsenstrasi lebih memenuhi kebutuhan ekonomi akibat

dampak yang ditimbulkan oleh wabah ini yang tdk bisa diprediksi kapan selesainya” (Apindo)

Penanganan pandemi Covid 19 oleh pemerintah ternyata mempengaruhi persepsi risiko politik oleh investor. Investor melihat hal tersebut sebagai komitmen politik untuk menjaga iklim investasi. Secara umum, investasi jelas akan mengalami perlambatan, Pemerintah perlu sangat responsif dalam menangani pandemi ini agar laju perlambatan investasi tidak cepat dan signifikan.

“Komitmen politik tercermin pada bagaimana menangani Covid sebagai bagian dari pencitraan iklim investasi. Investasi diperkirakan melambat, pertumbuhan ekonomi pasti melambat karena selama ini penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah makanan dan minuman sedangkan daya beli masyarakat lemah karena banyak PHK industri yang tutup akibat dari wabah ini.” (Reddy, Apindo)

“Investasi akan berjalan landai seiring dengan kebijakan prov Jateng terutama ditengah pandemi yang masih berlangsung. Pemeritah Prov Jateng perlu membuat sebuah kebijakan yang cepat dan tepat terhadap iklim investasi, kepastian hukum dan juga kebijakan" pemerintah akan sangat mempengaruhi iklim investasi.”.(Ratna, DPMTSP)

4.3.2. Praktek terbaik investasi dari sisi politik dan kelembagaan

Era globalisasi menjadikan batas antarnegara menjadi kabur, seolah menjadi tidak berbatas. Hal tersebut diimplementasikan melalui berbagai kerjasama ekonomi regional, bilateral maupun global, baik kebijakan terhadap tarif, kuota impor hingga penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal asing tersebut menjadi sarana bagi Pemerintah setiap negara untuk menggerakkan ekonominya melalui pembukaan lapangan kerja yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Perlu digarisbawahi bahwa investasi asing yang menguntungkan hanya apabila terjadi transfer teknologi. Studi dari Hapsari dan Prakoso (2016) bahwa investasi asing tidak memberikan transfer teknologi sehingga tidak terdapat pertumbuhan ekonomi regional yang signifikan. Hal ini pula yang ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa investor asing memiliki kewajiban untuk mentransfer teknologi ke Indonesia sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam skema kerja sama penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa dalam triwulan I, II, dan IV pada 2019, provinsi tujuan investasi secara fluktuatif bergantian antara Jawa Barat yang selalu berada diposisi pertama dengan nilai investasi terbesar, selanjutnya diikuti Jakarta atau Sulawesi Tengah, dan posisi ketiga secara konsisten berada di posisi ketiga. Hal menarik adalah meskipun Jawa Barat menjadi lokasi tujuan investasi asing terbesar di Indonesia, namun apabila dibandingkan antara nilai investasi dengan jumlah proyek maka rata-rata nilai investasi per proyek menjadi lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi tengah dan Jawa Tengah. Artinya, investasi yang masuk di Jawa Barat merupakan usaha dengan skala nilai investasi lebih kecil.

Tabel 9. Realisasi Penanaman Modal Asing berdasarkan Lokasi

Provinsi	Triwulan	Peringkat	Proyek	Nilai Investasi (juta USD)	Rata-Rata Nilai Investasi (ribu USD)
Jawa Barat	I	1	1.876	1.101,1	587,0
	III	1	3.050	1.498,2	491,2
	IV	1	3.081	1.452,5	471,6
DKI Jakarta	I	2	2.497	955,4	382,7
	II	2	3.249	902,6	277,8
	IV	4	2.819	520,6	184,7
Sulawesi Tengah	I	7	63	223,6	3.549,0
	II	7	121	368,3	3.043,8
	IV	2	110	775,1	7.046,4
Jawa tengah	I	3	449	774,8	1.725,6
	II	3	508	732,9	1.442,7
	IV	3	521	572,1	1.098,1

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Investor asing memiliki kebebasan dalam menentukan lokasi penanaman modal, selain itu karena tidak ada hukum khusus yang membatasi pilihan lokasi investasi investor. Bagian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi investasi oleh investor asing. Heizer dan Render (2006) menjelaskan konektivitas antara pemasok bahan baku, lokasi pabrik dan distribusi pada pelanggan menjadi faktor penting pemilihan lokasi. Ketiga hal sebenarnya dapat dirangkum melalui penyediaan infrastruktur yang memadai. Saat ini banyak

bermunculan Kawasan Industri di seluruh Indonesia. Kawasan Industri dianggap sebagai salah satu bentuk riil dari penyediaan infrastruktur yang baik karena umumnya Kawasan Industri dibangun pada lokasi strategis yang memungkinkan keterhubungan antara perusahaan dengan sumber bahan baku dan pelanggan dalam jalur yang paling efisien, selain itu Kawasan Industri umumnya dilengkapi dengan pengembangan infrastruktur pendukung (jalan, telekomunikasi, penerangan, dan sebagainya) yang baik.

Kawasan Industri tidak hanya digunakan sebagai lokasi pengolahan produk manufaktur (pembangunan pabrik), namun juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan perdagangan elektronik (*e-commerce*) untuk penyimpanan barang (*storage*). Pada tahun 2016, Kawasan industri berkontribusi sebesar 40% dari nilai total ekspor non-migas dan menarik investasi sebesar 60% dari total investasi sektor industri, diluar kontribusinya terhadap penerimaan negara dalam bentuk berbagai macam pajak. Kawasan Industri juga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Manfaat ekonomi yang diperoleh adalah rekrutmen masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja sebagai kegiatan pendukung. Beberapa daerah telah menetapkan ketentuan mengenai jumlah rekrutmen yang diwajibkan, misalnya Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mensyaratkan pengelola kawasan industri untuk mempekerjakan minimal 30 persen tenaga lokal pada tahun 2016. Kedua, pembukaan Kawasan Industri akan meningkatkan perekonomian melalui pembukaan fasilitas pendukung seperti pemenuhan kebutuhan pokok karyawan (penyewaan tempat tinggal, penjual bahan makanan mentah, makanan jadi serta kebutuhan sehari-hari lainnya), transportasi dan bahan bakar, dan sebagainya.

Kawasan Industri tidak hanya bermanfaat untuk menarik minat investor asing mengembangkan bisnis di Indonesia, namun Kawasan Industri juga merupakan salah satu bentuk investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi Kawasan Industri selama periode tahun 2017-2019 berasal dari USD 430,8 juta (PMA) dan Rp 700,2 miliar (PMD).

Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 108 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan

Kawasan Industri terbanyak yaitu sebanyak 30 kawasan Industri, sedangkan urutan kedua adalah Batam, Kepulauan Riau dengan 26 Kawasan Industri. Secara khusus, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah hanya memiliki dua Kawasan Industri, sedangkan Jawa Tengah sendiri terdapat tujuh Kawasan Industri yang berada di Kota Semarang, kabupaten Demak, Kabupaten Kendal.

Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate yang berada di Kabupaten Serang, Banten merupakan Kawasan Industri terbesar di Indonesia dengan luas 3.175 hektare. Perusahaan-perusahaan yang mengisi Kawasan Industri ini terdiri dari beberapa sektor yaitu: tekstil, makanan dan minuman beserta industri pendukungnya, dan material konstruksi seperti baja, bearing, aluminium, kaca, dan pipa, serta gudang. Bila dilihat, Kawasan Industri ini meliki lokasi yang strategis yaitu berjarak 68 km dari Jakarta, 75 km dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak dengan jarak pintu keluar ke Kawasan Industri hanya berjarak 1 Km atau sekitar lima menit perjalanan. Hal yang paling menarik adalah dikembangkannya klaster industri halal yang terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia. Modern Halal Valley merupakan zona industri halal yang mempraktikkan nilai-nilai standar halal Internasional dalam rantai pasokannya, mulai dari penciptaan ekosistem halal yang lengkap untuk produksi halal yang efisien serta pendistribusian domestik dan ekspor ke pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menarik investor berinvestasi maka tidak hanya dibutuhkan Kawasan Industri yang berlokasi strategis ataupun dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, namun juga inovasi pada pengelolaannya.

Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan Kawasan Industri di luar Jawa guna pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, pembangunan ekonomi memiliki dampak *multiplier* terhadap berbagai aspek lain seperti ketenagakerjaan, sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat. Hingga saat ini persentase penyebaran industri diluar Pulau Jawa hanya berkisar 20-an persen, diharapkan pada tahun 2035 dapat mencapai 40-an persen. Pemerintahan Joko Widodo selama dua periode berusaha melakukan pemerataan

kesejahteraan di Indonesia bagian Timur. Hal yang pertama dilakukan adalah mengintensifkan pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur merupakan *backbone* kegiatan perekonomian yang memungkinkan *multiplier effect* pada aspek kesejahteraan sosial dan kesehatan. Terlebih karena Indonesia bagian Timur memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah, misalnya daerah Teluk Bintuni yang memiliki potensi metanol dan amoniak serta turunnya. Kawasan Industri Teluk Bintuni yang nantinya diproyeksikan sebagai kawasan industri petrokimia ini menyerap investasi hingga Rp13 triliun serta bakal melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja pada tahap pembangunannya.

Tidak hanya memulai pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua. Implementasi kebijakan ini membantu industri setempat untuk melakukan produksi dengan biaya lebih rendah, selain itu biaya transportasi, biaya logistik akan menjadi lebih murah sehingga harga jual juga akan turun. Hal ini akan dalam membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan setempat.

Pembangunan Kawasan Industri bukannya tanpa hambatan, pembebasan lahan menjadi hambatan utama. Sesuai hukum permintaan dan penawaran maka kebutuhan lahan akan dimanfaatkan sebagai jalan sebagai permintaan program kompensasi yang umumnya diatas nilai sebenarnya (*overvalued*). Untuk daerah-daerah yang masih merupakan tanah adat, hal ini menjadi semakin kompleks karena ini tidak hanya melibatkan kesediaan individu perorangan namun masyarakat adat secara keseluruhan. Sengketa lahan merupakan masalah mati-hidup karena lahan merupakan sumber kehidupan utama. Peran dari Ketua Adat menjadi sangat krusial. Program kompensasi yang dimintapun juga tidak hanya bersifat materiil namun juga banyak hal lain yang seiring dengan hukum adat masyarakat setempat. Misalnya, pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni yang mensyaratkan adanya berbagai prosesi adat sebelum dan saat pembangunan proyek disamping pembayaran atas 50 hektar lahan kepada masyarakat adat.

Provinsi atau Kabupaten/Kota calon tujuan investasi juga perlu untuk melakukan proaktif melakukan promosi investasi. Pemerintah memiliki kantor *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) di delapan wilayah kerja

seluruh dunia untuk memfasilitasi kerja sama antara mitra investor dengan berbagai provinsi Indonesia. Daerah harus berlomba menawarkan pengembangan model bisnis yang baik dan sesuai potensi daerah serta peluang investasi yang ada, selain itu juga menjelaskan mengenai keuntungan yang didapatkan oleh pihak investor. Langkah proaktif yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai *showcase*, mengadakan *roadshow* yang diadakan di berbagai negara asal calon investor, dilengkapi dengan promosi berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh berbagai investor misalnya dengan mengembangkan website yang atraktif. Salah satu pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan investor melalui model promosi ini adalah Kabupaten Bantaeng yang mendapatkan investasi senilai US\$ 3 miliar dari China Harbour Engineering dan Shandong Xinhai Technology Co, Ltd guna pengembangan infrastruktur dan *smelter* pertama di kawasan Indonesia timur.

Faktor penting lainnya adalah risiko politik lokasi investasi tujuan. Risiko politik didefinisikan sebagai perubahan faktor politik yang menyebabkan ketidakstabilan imbal hasil investasi. Perubahan ini meliputi pergantian pemimpin daerah, lingkungan politik, budaya organisasi dari lembaga yang terkait dengan penanaman modal asing, korupsi.

Sesuai dengan Chen dan Funke (2008) bahwa lingkungan politik yang tidak stabil dapat menjadi penghalang investasi yang signifikan, hal itu menuntut terciptanya ketertarikan politik termasyuk saat pergantian pemimpin daerah pada negara demokratis. Investasi asing merupakan investasi sektor riil dalam jangka panjang, kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan proses yang panjang, tidak seperti karakteristik investasi pasar uang yang merupakan investasi jangka pendek dengan periode penarikan dana (*withdrawal*) hanya dalam hitungan hari dan hanya melibatkan perusahaan sekuritas. Pergantian kepala daerah dalam lima tahun sekali berarti setiap lima tahun akan ada pemilihan umum yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Hal yang menarik adalah kehadiran sosok calon kepala daerah yang mendapat dukungan dari masyarakat luas akan memperkecil peluang terjadi ketidakstabilan pada masa transisi ini. Dalam konteks Indonesia, calon kepala daerah dapat maju melalui jalur partai maupun jalur independen. Jalur partai merupakan jalur yang digunakan oleh kader partai tersebut atau siapapun yang diajukan partai. Sedangkan jalur independen merupakan jalur untuk seorang yang

bukan anggota partai untuk mengikuti pemilihan umum. Hal ini memungkinkan semua warga negara mendapat hak yang sama untuk maju dan dipilih sebagai kepala daerah.

Akademisi juga beroleh kesempatan untuk menjadi kepala daerah baik melalui jalur partai maupun independen. Meski begitu, jumlah akademisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendaftar sebagai calon kepala daerah masih belum banyak karena syarat untuk mendaftar mengharuskan untuk melepas status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pertaruhan yang dilakukan terlalu besar bila tidak disertai dengan persiapan yang matang. Calon kepala daerah dinilai memiliki integritas yang tinggi dibandingkan politisi yang berasal dari kader partai. Selain itu, akademisi memiliki kualifikasi, kompetensi dan *track record* yang teruji sehingga dinilai lebih mampu mengelola pemerintahan dan tidak hanya akan mengandalkan staf khusus atau staf ahli ketika nanti terpilih. Hal ini membuat potensi akademisi lolos menjadi kepala daerah menjadi lebih besar karena mendapatkan simpati dan kepercayaan publik.

Meski pada akhirnya, tidak semua akademisi dapat memenuhi persyaratan ataupun berhasil menjadi pemimpin daerah, namun beberapa diantaranya berhasil terpilih dan menjadi kepala daerah yang baik. Profesor Nurdin Abdullah menjadi Bupati Bantaeng selama dua periode pemilihan pada tahun 2008-2018, sebelum periode 2019-2024 menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Sebelum memutuskan menjadi pelayan masyarakat, Nurdin merupakan akademisi sekaligus memimpin beberapa perusahaan asing di Sulawesi Selatan. Terkait dengan usaha menarik modal asing, pemerintah daerah mulai meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil alam Bantaeng melalui serangkaian inovasi pertanian. Hal ini tidak jauh dari latar belakang Bupati karena Nurdin merupakan profesor ilmu pertanian yang menamatkan studi doktoralnya di Jepang. Peningkatan kualitas dan produktivitas hasil bumi seperti kakao menarik kehadiran dua perusahaan asing yang mendirikan industri kakao mentah. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan pembenahan infrastruktur berwawasan lingkungan termasuk didalamnya melakukan konsorsium pembangunan Kawasan Industri Bantaeng melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tiga investor asing dari

beberapa negara. Lebih lanjut, dukungan penuh dari birokrasi pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan ekstra mulai dari bantuan untuk mengurus perizinan dan pembangunan pabrik hingga administrasi tenaga kerja asing untuk perusahaan yang akan berinvestasi

Ketidakstabilan lingkungan politik tidak hanya dapat diredam melalui kehadiran sosok kuat yang memperoleh dukungan publik, namun juga karakteristik masyarakatnya. Persaingan politik akan semakin terasa saat satu atau beberapa kandidat mulai menggunakan politik identitas sebagai materi kampanye. Hal ini dapat memecah pemilih menjadi kelompok-kelompok yang dapat dikenali secara langsung, misalnya menggunakan agama, kesukuan sebagai identitas diri pemilih. Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang abangan dan nasionalis membuat tema-tema politik identitas menjadi tidak mendapat tempat di masyarakat. Selain itu, masyarakat Jawa Tengah bukan tipikal masyarakat yang menolak ajakan untuk memilih maupun menunjukkan pilihan politiknya secara tegas, ini berkaitan dengan budaya “*ewuh-pekewuh*” (sungkan) yang berkembang dalam masyarakat. Faktor lain yang mungkin signifikan dalam mempengaruhi kestabilan politik adalah pola masyarakat tradisional yang loyal pada satu partai politik tanpa mendalami latar belakang individu yang akan diusung oleh partai. Secara nasional, Jawa Tengah merupakan lumbung suara bagi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dalam setiap pemilihan umum. Dalam konteks lokal provinsi, gubernur-gubernur yang terpilih melalui pemilihan umum merupakan calon gubernur yang diusung oleh partai tersebut. Meskipun karakter-karakter tersebut tidak sepenuhnya baik karena dapat meningkatkan apatisme masyarakat namun disisi lain hal ini terbukti menjadi *buffer* dari ketidakstabilan politik.

4.4. Pentingnya kelembagaan dan politik dalam mendatangkan investasi

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan baik melalui data sekunder maupun primer, terlihat bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investasi baik PMA maupun PMDN. Berdasarkan hasil wawancara Investor melihat hal tersebut sebagai komitmen politik untuk menjaga iklim investasi. Pemerintah perlu sangat responsif dalam menangani pandemi ini agar laju

perlambatan investasi tidak cepat dan signifikan. Menurut sumber wawancara saat ini pemerintah telah cukup baik dalam menangani COVID-19 sehingga hal ini bisa menjadi modal besar dalam menarik investasi setelah kondisi kembali stabil. Kebijakan yang cepat dan tepat diperlukan agar iklim investasi dari sisi kelembagaan dan politik tetap terjaga. Keberpihakan pemerintah Jawa Tengah yang mencerminkan cara menghadapi risiko politik juga menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan. Investor membutuhkan iklim yang baik dan kondusif. Namun, apabila faktor risiko nasional dan regional diperbandingkan sebagai faktor yang mempengaruhi investasi maka investor akan menitiberatkan pada risiko investasi nasional karena ini akan berdampak masif pada seluruh kebijakan investasi asing. Berdasarkan hal ini maka penting sekali pemerintah Jawa Tengah dan kabupaten kota untuk berkomunikasi dan berkoordinasi baik dalam level regional maupun nasional. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan praktek terbaik dalam berinvestasi.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini tidak dapat mencapai hasil optimal namun masih bisa menjawab tujuan penelitian. Investasi merupakan komitmen investor atas sejumlah dana atau sumber daya lain saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi merupakan keputusan rasional investor dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap biaya dan manfaat investasi. Diantara berbagai faktor tersebut, faktor kelembagaan dan risiko politik merupakan faktor yang cukup sering muncul dalam diskusi-diskusi dikaitkan dengan masalah *clean and clear*, kemudahan perijinan, jaminan keamanan maupun kemauan politik pemerintah setempat. Menyadari pentingnya peran investasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menjadi ladang investasi. Hal ini terlihat dari semakin naiknya jumlah investasi yang masuk ke Jawa Tengah.

Dari sisi risiko politik, terlihat bahwa risiko politik nasional tidak dapat digeneralisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten kota karena setiap daerah memiliki kekhasan sendiri. Risiko politik Jawa Tengah dinilai relatif rendah karena karakter masyarakat Jawa Tengah yang cenderung lebih lemah lembut sehingga hal ini lebih menguntungkan dari sisi investasi.

Para investor juga melihat bahwa risiko politik nasional sebenarnya lebih dominan karena akan berdampak lebih masih. Risiko politik regional lebih bersifat *given* dan mengikuti arus yang ada pada level nasional.

Dari sisi kebijakan terlihat bahwa investor cukup puas akan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jawa Tengah, termasuk di dalamnya adalah kebijakan menangani COVID-19. Kebijakan yang responsif dan tepat dipandang menjadi kunci untuk menarik investor.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi bagi pemerintah Jawa Tengah terutama untuk DPMPTSP adalah:

1. Mempertahankan kondisi investasi yang ada termasuk dari sisi politik dan kelembagaan
2. Meningkatkan respon yang lebih cepat dan tepat dalam kondisi-kondisi tertentu terutama terkait dengan ketengakerjaan, dan peraturan perijinan yang dirasa sering menghambat adanya investasi

DAFTAR PUSTAKA

- Akinkugbe, Oluyele. 2003. "W of Foreign Direct Investment to Hitherto Neglected Developing Countries." In *World Institute for Development Economics Research*, 23–24. Helsinki.
- Benacek, V., M. Gronicki, D. Holland, and M. Sass. 2000. "The Determinants and Impact of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: A Comparison of Survey and Econometric Evidence." *Transnational Corporations*.
- Bevan, Alan, Saul Estrin, and Klaus Meyer. 2001. "Institution Building and the Integration of Eastern Europe in International Production." *Focus*.
- Busse, Matthias, and Carsten Hefeker. 2007. "Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment." *European Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003>.
- Chen, Yu-Fu, and Michael Funke. 2008. "Political Risk, Economic Integration, and the Foreign Direct Investment Decision." Vol. 208. <https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23>.
- Dumludag, D, E Saridogan, and S Kurt. 2007. "Determinants of Foreign Direct Investment: An Institutional Approach." *Seventh Conference of the European*
- Hapsari, Rahma Dian, and Imam Prakoso. 2016. "Penanaman Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19 (2): 211. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.554>.
- Harms, Philipp, and Heinrich W. Ursprung. 2002. "Do Civil and Political Repression Really Boost Foreign Direct Investments?" *Economic Inquiry*. <https://doi.org/10.1093/ei/40.4.651>.
- Heizer, Jay, and Barry Render. 2006. "Principles of Operations Management." *Genes Genetic Systems*.
- Lim, Ewe-Ghee. 2001. "Determinants of, and the Relation Between, Foreign Direct Investment and Growth: A Summary of the Recent Literature." *IMF Working Papers*. <https://doi.org/10.5089/9781451858754.001>.

LAMPIRAN 1
SURAT TUGAS

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Pahlawan Luhur W/1 Bendaan Dwar Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



SURAT TUGAS

Nomor: 00222/B.7.2/ST/FEB/1/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

- Nama : Dr. Angelina Ika Rahutami NIDN : 0622026802
MG. Westri Kekalih, SE.,ME NIDN : 0624046901
Shresta Purnamasari, SE.,MSc NPP : 05812019368
- Status : Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas : Melakukan Penelitian tentang : *Kajian Investasi Asing di Jawa Tengah Pendekatan Ekonomi Institutional*
- Tempat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
- Waktu : Periode Ganjil & Genap Tahun Akademik 2019 - 2020
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Semarang, 13 Januari 2020
Dekan,



Dr. OCTAVIANUS D. HARTOMO, M.Si., Akt.
NPP: 058.1.1995.170

Telah melaksanakan tugas
Mengetahui :

()

LAMPIRAN 2
KUESIONER PENELITIAN

Panel A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : _____

Alamat : _____

CP / No. Telp : _____

Industri : _____

Tahun berdiri : _____

Panel B. Faktor risiko politik level kabupaten/kota

Terdapat keselarasan dan dukungan dari lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi dalam implementasi kebijakan investasi : Sangat setuju
 Setuju
 Netral
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

Terdapat tekanan sosio-ekonomi (misal: pengangguran, kemiskinan, rendahnya daya beli) dalam masyarakat di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi sehingga memicu ketidakpuasan sosial : Sangat setuju
 Setuju
 Netral
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

Terdapat risiko pengambilalihan (ekspropriasi) bisnis di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi : Sangat setuju
 Setuju
 Netral
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

Terdapat risiko hambatan repatriasi keuntungan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran saat berinvestasi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi : Sangat setuju
 Setuju
 Netral
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

Terdapat konflik (demo, perang, terorisme) di wilayah Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi yang berdampak serius terhadap investasi : Sangat setuju
 Setuju
 Netral
 Tidak setuju

	<input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat konflik (demo, perang, terorisme) di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi yang berdampak serius terhadap investasi	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum Pemerintah Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi sehingga mengganggu investasi Anda	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat peran kekuatan militer yang besar dalam meminimalisir risiko politik di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tingkat ketegangan perbedaan agama yang tinggi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tingkat kriminalitas yang tinggi tanpa terdapat sanksi yang efektif di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tingkat ketegangan perbedaan ras, kebangsaan, atau bahasa yang tinggi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Pemerintah Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi bersikap responsif dalam menangani permasalahan masyarakat	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Sistem birokrasi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi tidak diintervensi oleh tekanan politik	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju

-
- Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
-

Panel C. Faktor risiko politik level provinsi

Terdapat keselarasan dan dukungan dari lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan investasi	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tekanan sosio-ekonomi (misal: pengangguran, kemiskinan, rendahnya daya beli) dalam masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sehingga memicu ketidakpuasan sosial	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat risiko pengambilalihan (ekspropriasi) bisnis di Provinsi Jawa Tengah	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat risiko hambatan repatriasi keuntungan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran saat berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat konflik (demo, perang, terorisme) di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berdampak serius terhadap investasi	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat konflik (demo, perang, terorisme) di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berdampak serius terhadap investasi	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mengganggu investasi Anda	: <input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju

	<input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat peran kekuatan militer yang besar dalam meminimalisir risiko politik di Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tingkat ketegangan perbedaan agama yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tingkat kriminalitas yang tinggi tanpa terdapat sanksi yang efektif di Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Terdapat tingkat ketegangan perbedaan ras, kebangsaan, atau bahasa yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersikap responsif dalam menangani permasalahan masyarakat	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju
Sistem birokrasi di Provinsi Jawa Tengah tidak diintervensi oleh tekanan politik	<input type="checkbox"/> Sangat setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Sangat tidak setuju

LAMPIRAN 3
WAWANCARA MENDALAM

Petunjuk pengisian:

Pengisian dilakukan oleh pewawancara. Pewawancara wajib membacakan pertanyaan, sembari melakukan perekaman jawaban baik secara tertulis maupun audio yang berguna untuk *cross validation*. Pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan apabila dirasa ada hal-hal yang menarik diteliti lebih lanjut.

Tidak diperkenankan untuk ditunjukkan, diisi langsung oleh responden

I. INVESTOR INDIVIDUAL

Panel A. Identitas Responden

Nama Responden	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
CP / No. Telp	:
Industri	:
Tahun berdiri	:

Panel B. Pertanyaan

Menurut Anda, bagaimana iklim investasi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi ?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang
Menurut Anda, bagaimana iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang
Sebelum memutuskan berinvestasi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi,	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

apakah Anda mengetahui mengenai Kabupaten/Kota tersebut ? Bila ya, apa yang Anda ketahui?	
Sebelum memutuskan berinvestasi di Kabupaten/Kota tempat perusahaan Saudara beroperasi, apakah Anda berkonsultasi dengan pihak lain (konsultan, sesama investor, dinas, dll) yang Anda anggap mengetahui Kabupaten/Kota tersebut? Mohon sebutkan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Ceritakan apa yang sebelumnya Anda ekspektasikan serta bagaimana kondisi riil dari wilayah Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi terkait dengan aspek-aspek berikut ini:	
Iklim investasi	
Ekspektasi	Kondisi riil
Kepastian hukum	
Ekspektasi	Kondisi riil
Infrastruktur	
Ekspektasi	Kondisi riil

Tenaga kerja	
Ekspektasi	Kondisi riil
Suplai bahan baku	
Ekspektasi	Kondisi riil
Distribusi produk	
Ekspektasi	Kondisi riil
Minat konsumen	
Ekspektasi	Kondisi riil
Penjualan	
Ekspektasi	Kondisi riil
<p>Dari sekian hal tersebut, mohon urutkan dari aspek yang paling penting menurut Anda. (1= paling penting,, 8= paling tidak mempengaruhi)</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ... Iklim investasi ... Kepastian hukum ... Infrastruktur ... Tenaga kerja ... Suplai bahan baku ... Distribusi produk ... Minat konsumen ... Penjualan 	
Kendala investasi apa yang Anda alami?	
<p>Dari 11 risiko berikut, mohon urutkan dari risiko terbesar yang mungkin mempengaruhi bisnis Anda. (1= paling mempengaruhi bisnis, ..., 11= paling tidak mempengaruhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ... Stabilitas pemerintah ... Tekanan sosio-ekonomi ... Penilaian investasi ... Konflik internal ... Konflik eksternal ... Korupsi ... Militer ... Ketegangan antar-agama ... Hukum dan ketertiban ... Ketegangan antar-etnis ... Akuntabilitas demokratis ... Kekuatan kelembagaan dan kualitas birokrasi 	
Bagaimana kesan Anda saat pertama kali mengurus ijin ke DPMPTSP ?	<input type="checkbox"/> Sangat membantu <input type="checkbox"/> Tidak membantu
Apakah Anda pernah berinteraksi lagi dengan DPMPTSP setelah proses pengurusan ijin tersebut? Misal: menyampaikan keluhan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Bagaimana DPMPTSP menanggapi keluhan Anda?	
Menurut Anda, bagaimana kinerja DPMPTSP?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Buruk

Apakah Anda puas dengan kinerja DPMPTSP?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah Anda memiliki saran perbaikan atas kinerja DPMPTSP?	
Apakah Anda pernah berinteraksi/mengeluhkan mengenai tenaga kerja, industri, dll dengan pemerintah (dinas) terkait? Bila ya, mohon sebutkan nama dinas dan keperluannya	<input type="checkbox"/> Ya, Dinas <input type="checkbox"/> Tidak
Bagaimana tanggapan dinas tersebut?	
Menurut Anda, bagaimana kinerja dinas tersebut ?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Buruk
Apakah Anda puas dengan kinerja dinas tersebut?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah Anda memiliki saran perbaikan atas kinerja dinas tersebut?	
Apakah Anda mengetahui bahwa ada oknum pemerintah yang meminta gratifikasi sebagai ganti kemudahan yang dijanjikan? Apa bentuk gratifikasi yang diminta?	<input type="checkbox"/> Ya, dalam bentuk <input type="checkbox"/> Tidak
Apa yang Anda lakukan?	<input type="checkbox"/> Memberikan <input type="checkbox"/> Tidak memberikan
Apakah Anda mengetahui terdapat asosiasi bisnis yang sama dengan yang Anda tekuni di	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Kabupaten/Kota tempat perusahaan Anda beroperasi?	
Apakah Anda aktif dalam organisasi tersebut?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Menurut Anda, apa manfaat dari adanya asosiasi bisnis?	
Apakah Anda merasakan manfaat tersebut?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah Anda merasa terwakili di dalam asosiasi tersebut?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Bagaimana kinerja asosiasi?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Buruk

II. ASOSIASI

Panel A. Identitas Responden

Nama Responden :
Nama Asosiasi :
Alamat :

CP / No. Telp :
Industri : Tersegmentasi / Multi-industri
Jumlah anggota :
Tingkatan : Lokal / Perwakilan
Tahun berdiri :

Panel B. Pertanyaan

Menurut Anda, bagaimana iklim investasi di Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang
Menurut Anda, bagaimana iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang
Apa saja kegiatan rutin asosiasi?	
Apakah sesama investor membina hubungan informal dengan intensitas tinggi?	<input type="checkbox"/> Ya, semua orang <input type="checkbox"/> Ya, beberapa orang saja <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah investor asing terlibat aktif dalam asosiasi?	<input type="checkbox"/> Ya, semua orang <input type="checkbox"/> Ya, beberapa orang saja <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah asosiasi pernah mendapat keluhan dari investor asing? Apa yang dikeluhkan?	

Apakah asosiasi mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah terkait? Misal : DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian	<input type="checkbox"/> Ya, Dinas <input type="checkbox"/> Tidak
Bagaimana tanggapan masing-masing dinas tersebut?	
Bagaimana kinerja Dinas tersebut?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Buruk
Apakah Anda memiliki saran perbaikan atas kinerja masing-masing dinas tersebut?	
Apakah Anda mengetahui ada oknum pemerintah yang meminta gratifikasi sebagai ganti kemudahan yang dijanjikan? Apa bentuk gratifikasinya?	<input type="checkbox"/> Ya, dalam bentuk <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah Anda mengetahui bahwa ada investor mencoba menawarkan gratifikasi sebagai balas jasa permohonan kemudahan investasi? Apa bentuk gratifikasi yang ditawarkan?	<input type="checkbox"/> Ya, dalam bentuk <input type="checkbox"/> Tidak
Apa yang dilakukan investor?	<input type="checkbox"/> Memberikan <input type="checkbox"/> Menolak
Apa yang dilakukan dinas tersebut?	<input type="checkbox"/> Menerima <input type="checkbox"/> Tidak menerima
Apakah asosiasi memiliki kesulitan untuk bekerjasama dengan investor asing? Jika ya, mohon sebutkan	<input type="checkbox"/> Ya, karena <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah asosiasi sudah cukup merepresentasikan investor secara keseluruhan? Jika belum, apa yang akan dilakukan oleh asosiasi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Belum, sehingga

III. PEMERINTAH / DPMPTSP

Panel A. Identitas Responden

Nama Responden : _____

Alamat Kantor : _____

No. Telp : _____

Panel B. Pertanyaan

Menurut Anda, bagaimana iklim investasi di Kabupaten/Kota tempat Anda bekerja?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang
Menurut Anda, bagaimana iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah?	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang
Berapa jumlah permintaan ijin? Berapa realisasi ijin yang diterbitkan tiap tahun selama lima tahun terakhir?	
Jumlah permintaan	Jumlah realisasi
Tahun 1	
Tahun 2	
Tahun 3	
Tahun 4	
Tahun 5	
Apakah dinas memiliki layanan khusus terkait permintaan ijin usaha oleh investor asing? Misalnya: layanan pertanyaan	<input type="checkbox"/> Ya, layanan <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah kendala saat berinteraksi dengan investor asing?	
Apa keluhan dari investor asing selama mengurus perijinan?	

Bagaimana tanggapan dinas?	
Apakah responden mengetahui bahwa ada investor mencoba menawarkan gratifikasi sebagai balas jasa permohonan kemudahan investasi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Apa yang dilakukan dengan gratifikasi tersebut?	<input type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
Apakah dinas berinteraksi lagi dengan investor asing setelah investasi direalisasi? Misalnya: menanyakan kendala, keluhan investor asing, studi kepuasan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah dinas rutin melakukan evaluasi pelayanan? Kapan evaluasi dilaksanakan?	<input type="checkbox"/> Ya, setiap..... <input type="checkbox"/> Tidak
Setelah evaluasi dilakukan, apakah ada langkah perbaikan? Berikan contohnya.	
Apakah dinas rutin berkomunikasi dengan asosiasi?	
Apakah asosiasi menyampaikan keluhan investor asing terhadap investasinya?	
Apakah asosiasi merepresentasikan investor asing secara keseluruhan?	
Apakah adanya asosiasi memberikan manfaat dalam menjembatani hubungan antara dinas dan investor asing? Manfaat apa yang diberikan asosiasi?	<input type="checkbox"/> Ya, karena <input type="checkbox"/> Tidak
Apa saran dinas terkait hubungan asosiasi dan investor asing?	

